



## **PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

# **Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019**

*Jl. KH. Abdul Halim No. 522 Telp/Faximile (0233) 8291698 MAJALENGKA 45413*



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. KH. Abdul Halim No. 522 Kode Pos 45413 MAJALENGKA  
Telp/Faximile ( 0233 ) 8291698, Email : disnakerinmajalengka@yahoo.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 47 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN 2019**

**KEPALA TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN MANUSIA**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai salah satu Perangkat Daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019;
- b. agar dalam menyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih terarah dan terukur, serta dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan secara efektif, tepat waktu dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
- b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
- c. Menyusun materi Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
- d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
- e. Melaksanakan pendistribusian Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 11 Juli 2019

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**SADILI**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 47 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 11 Juli 2019**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
2. Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Kabupaten Majalengka
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Kabupaten Majalengka
4. Anggota :
  1. Kepala Bidang Pelayanan Tenaga Kerja;
  2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Hubungan Industri;
  3. Kepala Bidang Perindustrian;
  4. Kepala Sub Bagian Umum;
  5. Kepala Seksi Seksi Pembinaan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan;
  6. Kepala Seksi Pendataan Penyaluran Dan Penanganan Masalah Tenaga Kerja;
  7. Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
  8. Kepala Seksi Pengawasan Hubungan Industrial;
  9. Kepala Seksi Pelayanan Dan Penanganan Imta Dan Retribusi Orang Asing;

10. Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Industri
11. Kepala Seksi Pelaporan Dan Evaluasi Industri.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MAJALENGKA,





**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. KH. Abdul Halim No. 522 Kode Pos 45413 MAJALENGKA  
Telp/Faximile ( 0233 ) 8291698, Email : disnakerinmajalengka@yahoo.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor: 52.A Tahun 2019

**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tidak lanjut Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai salah satu Perangkat Daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2019.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 29 Juli 2018

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MAJALENGKA  
SELAKUPENGGUNA ANGGARAN**



**SADILI**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019, telah selesai kami susun.

Rencana Kerja merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka serta berpedoman kepada RKPD Kabupaten Majalengka yang mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2019-2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

Dalam Penyusunannya, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka mengacu pada RKPD Kabupaten Majalengka dengan mempertimbangkan seluruh potensi, kondisi dan permasalahan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan Rencana Kerja sebelumnya dengan mempertimbangkan kekuatan atau modal dasar yang dimiliki.

Untuk mencapai tujuan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka ini, dalam pelaksanaannya diharapkan mendapat dukungan dari semua *stakeholder* dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2019. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua. Aamiin...

Majalengka, 29 Juli 2019

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kabupaten Majalengka,



**Dr. Ir. H. SADILI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610902 199002 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
<b>BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.3 Isus-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>14</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	16
3.3 Program dan Kegiatan	16
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>18</b>
<b>BAB V     PENUTUP</b>	<b>21</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Realisasi Program	5
Tabel 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka	7

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka menangani 1 (satu) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Tenaga Kerja; dan 2 (dua) Urusan Pilihan yaitu Perindustrian dan Transmigrasi.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini merupakan rencana operasional dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka. Renja ini memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif khususnya yang terkait dengan Urusan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

Penyusunan Renja dimulai dengan persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum perangkat daerah dan penetapan Renja perangkat daerah.

Renja ini disusun agar program dan kegiatan yang ada dalam Renja ini menjadi bagian dari program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka

Kaitan Renja dengan dokumen perencanaan Kabupaten Majalengka adalah sebagai satu rangkaian saling terkait dan saling menunjang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majalengka.

### **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019 (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 28).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

1. Dihasilkannya suatu dokumen perencanaan operasional tahunan yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah bidang ketenagakerjaan dan perindustrian, perencanaan arah kebijaksanaan, perumusan strategi sesuai dengan kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;

2. Dirumuskannya pedoman perencanaan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian bagi seluruh pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

### **1.3.2 Tujuan**

**Tujuan :** Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka bertujuan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan tahun 2017;
2. Melaksanakan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian yang dituangkan dalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2019 dengan melihat keterkaitan dengan visi Pemerintah Kabupaten Majalengka;

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana kerja ini disusun dengan dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

**BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II      HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isus-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III     TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V      PENUTUP**

**LAMPIRAN**

**BAB II  
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dari evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka diperoleh hasil bahwa seluruh program dapat mencapai target indikator kinerja bahkan ada yang melebihi target. Hal ini bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1  
Realisasi Program

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD	100 Persen	100 Persen	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif	100 Persen	100 Persen	100%
3.	Program Sinergitas Perencanaan dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi Sinergitas Perencanaan dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	100%
4.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	2%	29,65%	1.483%
5.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	10%	14,66%	146,6%
6.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	21,24%	6,06%	350,5%
7.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terselenggaranya pewilayahan industri bagi industri kecil dan menengah	1 Sentra IKM	1 Sentra IKM	100%
8.	Program Transmigrasi Lokal	Tertatanya lingkungan UPT lokal	1 UPT	1 UPT	100%

Adapun Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka: Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 33,33% (K) dan 30,11% (Rp), sementara Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra 60,98% (K) dan 65,30% (Rp). Hal itu bisa dilihat dalam tabel terlampir.

Untuk target tahun 2018 kemungkinan bisa tercapai sebagaimana tahun 2017. Hal itu karena sumber daya yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana masih sama dengan tahun 2017.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka untuk tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
(1)		(5)		(6)	(7)	(8)	(8)	(9)				
1.	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD		✓	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
2.	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif		✓	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
3.	Optimalisasi Sinergitas Perencanaan dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		✓	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
4.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	✓		2%	2%	-	-	29,65%	-	-	-	
5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	✓		10%	10%	-	-	14,66%	-	-	-	
6.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	✓		21,24	17,70	-	-	6,06	-	-	-	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
(1)		(5)		(6)	(7)	(8)	(8)	(9)				
7.	Terselenggaranya pelayanannya industri bagi industri kecil dan menengah		√	1	0	-	-	1	-	-	-	
8.	Tertatanya lingkungan UPT lokal		√	1	1	1	1	1	-	-	-	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka adalah:

Permasalahan utama Bidang Ketenagakerjaan adalah:

1. Masih kecilnya laju penyerapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya kapasitas tenaga kerja atau minimnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja;
3. Belum terpetakannya ketenagakerjaan;
4. Masih rendahnya pemantauan dan perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

Permasalahan utama bidang perindustrian adalah:

1. Belum tersedianya kawasan industri;
2. Pemanfaatan bahan baku lokal yang masih rendah;
3. Aksesibilitas permodalan yang terbatas;
4. Inovasi produk masih rendah;
5. Penguasaan teknologi yang masih rendah;
6. Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
7. Belum tersedia/terfasilitasinya ruang pameran hasil produksi;
8. Aksesibilitas perbankan masih rendah untuk mendukung industri kecil;
9. Kualitas produk belum memenuhi standar.

Permasalahan utama urusan transmigrasi adalah:

1. Kurangnya motivasi dan minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi;
2. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana yang menunjang keberhasilan program transmigrasi.

Apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera dicari solusinya maka akan mengakibatkan tidak tercapainya target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka, yang pada gilirannya akan berakibat tidak tercapainya target visi dan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- Lingkungan Internal meliputi :

1. Kekuatan (Strenght)

- Adanya Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku lingkup ketenagakerjaan dan perindustrian.
- Adanya komitmen Aparatur Ketenagakerjaan dan Perindustrian.
- Masih tingginya partisipasi masyarakat,
- Tersedianya sumber daya alam.
- Komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka Tertuang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa prioritas pembangunan selalu berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta daya beli.

2. Kelemahan (Weakness)

- Penyebaran informasi pasar kerja yang belum maksimal.
- Masih adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ketenagakerjaan, antara lain seperti belum terpenuhinya syarat-syarat kerja suatu perusahaan, perlunypembinaan hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja di suatu perusahaan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
- Masih terdapat hubungan kerja yang kurang jelas/tidak dengan melalui ikatan kerja dalam bentuk perjanjian tertulis.
- Masih adanya perusahaan pemberi kerja dan penerima kerja tidak melaporkan perjanjian kerjanya ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- Pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan dan kemudian diusulkan kepada Gubernur, terdapat perbedaan pemahaman antara pekerja dan pengusaha sehingga perlu dibangun komunikasi aktif guna tercipta suasana kerja yang kondusif dan ramah investasi..
- Jumlah tenaga mediator/pengawas yang masih kurang
- Rata-rata lama sekolah tahun 2013 baru mencapai 7,1 tahun, daya beli masyarakat masih cukup rendah, tahun 2010 hanya 63,29 %,

keterampilan penduduk yang terbatas sehingga tidak memiliki daya saing, kurang berkembangnya ekonomi local, masih lemahnya dalam mengevaluasi secara komperhensif angka kemiskinan dan masih kurangnya pengendalian data base kemiskinan.

- Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana dan prasarana yang tersedia.

- Lingkungan eksternal meliputi :

1. Peluang (opportunities)

- Besarnya potensi industri yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi.
- Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi.
- Adanya akses kemudahan perbankan bagi pelaku IKM
- Adanya lembaga-lembaga pendukung bagi pengembangan ketenagakerjaan dan perindustrian.
- Adanya industri besar dan industri kecil berpartisipasi dalam merekrut angkatan kerja.
- Pembangunan BIJB Kertajati, Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan Cikopo Palimanan, Pembangunan Waduk Jatigede, Pengembangan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

2. Tantangan (Threats)

- Skill ( keahlian ) pencari kerja yang perlu ditingkatkan.
- Sebagian besar perusahaan mendatangkan tenaga kerja AKAD untuk memenuhi kebutuhan perusahaanya.
- Tenaga Kerja Asing implikasinya tenaga pendamping yang harus disiapkan, yang terjadi tenaga kerja asing selalu bertambah dan posisi mereka tidak juga tergantikan khususnya untuk posisi-posisi tertentu.
- Masih adanya daerah yang menjadi kantong kemiskinan.
- Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan.
- Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan.
- Tingkat inflasi yang fluktuatif pada skala nasional dan regional implasi memiliki dampak positif jika implasi itu ringan dapat mendorong

perekonomian lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Dampak negatifnya jika terjadi inflasi tak terkendali atau hiper inflasi, keadaan perekonomian akan menjadi kacau dan lesu, tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat.

- Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin; tidak tersedianya pelayanan sosial dasar; tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis).
- Apabila dilihat dari trend pergerakan pendidikan, dunia ketenagakerjaan sekarang ini dihadapkan pada kecenderungan baru yaitu berupa pergeseran pengangguran terbuka dari angkatan kerja berpendidikan rendah menuju kearah angkatan kerja berpendidikan yang lebih tinggi
- Lembaga Latihan Kerja harus lebih banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus mengandung unsur *knowledge*, *skills* dan *attitudes*.
- Lemahnya koordinasi dengan lintas OPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya.
- Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Semua program/kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka sudah terakomodir dalam Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2019.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan dalam Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, lintas perangkat daerah sampai tingkat kabupaten.

Semua usulan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Tahun 2019, yaitu kegiatan pelatihan-pelatihan keterampilan.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

#### **Telaahan Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia**

Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah; pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah. Untuk menghadapi tantangan di bidang ketenagakerjaan ini, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan 6 (enam) fokus program, yaitu:

1. Penciptaan lapangan kerja baru yang targetnya periode 2105-2019 sebanyak 10 juta.
2. Membangun SDM, berupa pelatihan-pelatihan.
3. Perlindungan buruh migran Indonesia.
4. Jaminan sosial untuk tenaga kerja.
5. Pengawasan ketenagakerjaan, khususnya perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya dan sektor konstruksi
6. Revisi undang-undang ketenagakerjaan, yang akan ditekankan pada isu keseimbangan beban antara perusahaan dan pekerja.

### **Telaahan Kebijakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia**

Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah **Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia** yang bercirikan :

1. Industri kelas dunia;
2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa;
3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar.

Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya Negara Industri Maju Barus sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain:

1. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya;
2. Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional;
3. Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar;
4. Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat);
5. Jasa industri yang tangguh.

Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuh-suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Dalam mewujudkan Visi Kementerian Perindustrian tahun 2020, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian strategis (Strategic Outcomes) yaitu :

1. Meningkatnya nilai tambah industri;
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3. Meningkatnya kemampuan SDM Industri, R&D dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan;
5. Lengkap dan menguatnya struktur industri;
6. Tersebarnya pembangunan industri;
7. Meningkatnya peran IKM terhadap PDB.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka**

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Kapasitas Kinerja Perangkat Daerah

- Indikator Tujuan : Kategori Nilai SAKIP Perangkat Daerah  
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator Sasaran : Tindak Lanjut Temuan Inspektorat / BPK
2. Tujuan 2 : Mengurangi jumlah pengangguran  
Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Sasaran 1 : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja  
Indikator Sasaran 1 : Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
3. Tujuan 3 : Mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam suasana kondusif dan ramah investasi  
Indikator Tujuan : Jumlah perusahaan yang dibina  
Sasaran : Menurunnya sengketa perselisihan Hubungan Industrial  
Indikator Sasaran 1 : Persentase menurunnya pengaduan perselisihan Hubungan Industrial  
Indikator Sasaran 2 : Persentase kasus yang diselesaikan
4. Tujuan 4 : Meningkatkan kontribusi sektor Industri terhadap perekonomian daerah  
Indikator Tujuan : PDRB Sektor Industri  
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri berbasis ekonomi kerakyatan  
Indikator Sasaran 1 : Jumlah IKM baru  
Indikator Sasaran 2 : Nilai Produksi

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka disusun dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Jumlah program dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka sebanyak 8, sedangkan jumlah kegiatannya sebanyak 35.

Lokasi program kegiatan tersebar di beberapa wilayah sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Untuk pelatihan-pelatihan dilaksanakan di daerah-daerah yang mempunyai destinasi wisata, dalam rangka menunjang program kepariwisataan yang menjadi sektor unggulan Pemerintah kabupaten Majalengka. Sementara untuk perindustrian, ditekankan kepada peningkatan jumlah industri baru disamping terus

meningkatkan kualitas produk industri yang sudah ada sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan program dan kegiatan tahun 2019 sebesar Rp. 29.821.269.525,94 dengan rincian sumber dana sebagai berikut:

1. APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.110.618.875,00
2. APBN/DAK sebesar Rp. 26.170.100.000,00
3. Pajak Rokok sebesar Rp. 1.540.550.650,94

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana program tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik
2. Program Administrasi Perkantoran
3. Program Penguatan Adat
4. Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat
5. Program Optimalisasi Sumber Daya
6. Program Pengendalian Tata Ruang
7. Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik
8. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Rencana kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik*
  - 1.1. Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Dalam Memfasilitasi Penyelenggaraan kegiatan May Day yang Kondusif;
2. *Program Administrasi Perkantoran*
  - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - 1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
  - 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 1.6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 1.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - 1.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
  - 1.11. Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran;
  - 1.12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
  - 1.13. Penyusunan Renja OPD;
  - 1.14. Penyusunan RKA OPD;
  - 1.15. Penyusunan DPA OPD;
  - 1.16. Penyusunan Lakip OPD;
  - 1.17. Penyusunan Renstra;

1.18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor.

**3. Program Penguatan Adat**

1.1. Pendidikan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Hubungan Industrial.

**4. Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat**

4.1. Pemilihan Pekerja Teladan

4.2. Pendidikan Pelatihan Keterampilan bagi para

**5. Program Optimalisasi Sumber Daya**

5.1. Pembangunan Berkelanjutan SIKM

5.2. Sertifikasi Nilai Kecukupan Gizi bagi Produk Pengolahan Makanan

5.3. Perumusan, Penetapan dan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK dan UMK Sektoral BIJB);

**6. Program Pengendalian Tata Ruang**

6.1. Kajian Pemanfaatan Sentra IKM;

**7. Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik**

7.1. Updating Pertumbuhan Industri Kecil Menengah

7.2. Pengembangan, Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

7.3. Penyusunan Profil

7.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

7.5. Penyusunan Pelaporan Realisasi Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran OPD;

**8. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

8.1. Padat Karya Infrastruktur.

Secara rinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2019, terlampir.

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana kerja ini merupakan dokumen perencanaan urusan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi untuk periode 1 (satu) tahun.

Program dan kegiatan dalam Rencana kerja ini disusun berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renja ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Majalengka.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka. Karena itu, Renja ini harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

Harus diupayakan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka ini merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan atau target kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka. Laporan Kinerja (LAKIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahkan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka ini.

Majalengka, 29 Juli 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kabupaten Majalengka,



**Dr. Ir. H. SADILI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610902 199002 1 001





**PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2019  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan K.H. Abdul Halim No. 522, MAJALENGKA 45413  
Telepon ( 0233 ) 8291698

# LAMPIRAN

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan)	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif dalam RKPD 2019 (Rp)	Pagu dalam DPA OPD (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Kelompok Program / Kegiatan : PRIORITAS</b>											
2.	Wajib Non Pelayanan Dasar										
2.14.	Tenaga Kerja										
2.14.20	Program Penguatan Adat		Tumbuhnya perilaku masyarakat yang menghindari konflik	10.00 Persen					25,875,000	25,150,000	25,150,000
2.14.20.1	Pendidikan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Hubungan Industrial	Wilayah Kabupaten Majalengka			Diadakannya Dialog Sosial	1.00 kali	Tumbuhnya perilaku masyarakat yang menghindari konflik	2.50 Persen	25.875.000	25.150.000	25.150.000
2.14.26	Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	15.00 persen					331,250,000	331,250,000	331,250,000
2.14.26.2	Pendidikan Pelatihan Keterampilan bagi para Pencari Kerja	Desa Sagara Kecamatan Argapura (Pelatihan Kuliner), Desa Bantar Agung Kecamatan Sindangwangi (Pelatihan Kuliner)			Dilaksanakannya pendidikan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja	2.00 kali	Peserta memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja maupun untuk berwirausaha	120.00 orang	331.250.000	331.250.000	331.250.000
2.14.43	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik		Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	12.00 Bulan					1,580,000	2,330,000	4,490,000
2.14.43.5	Penyusunan Pelaporan Realisasi Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran OPD	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran	2.00 Dokumen	Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran dan laporan prognosis realisasi anggaran	2.00 Dokumen	1.080.000	1.455.000	3.615.000
2.14.43.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	500.000	875.000	875.000
2.14.47	Program Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	12.00 Bulan					3,500,000	980,000	980,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan)	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif dalam RKPD 2019 (Rp)	Pagu dalam DPA OPD (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.14.47.22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.00 Bulan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.00 Bulan	3.500.000	980.000	980.000
2.14.47	<b>Program Administrasi Perkantoran</b>		<b>Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (Dokumen)</b>	<b>50.00 Persen</b>					<b>1.000.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
2.14.47.21	Penyusunan LAKIP OPD	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyusunan LAKIP OPD	1.00 Dokumen	Tersusunnya LAKIP OPD	1.00 Dokumen	1.000.000	650.000	650.000
2.14.47	<b>Program Administrasi Perkantoran</b>		<b>Tersusunnya Perencanaan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang (Dokumen)</b>	<b>50.00 Persen</b>					<b>1.000.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
2.14.47.19	Penyusunan RKA OPD	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyusunan RKA	2.00 Dokumen	Tersusunnya RKA dan RKAP	2.00 Dokumen	1.000.000	1.020.000	1.020.000
2.14.47	<b>Program Administrasi Perkantoran</b>		<b>Tersusunnya Perencanaan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang (Dokumen)</b>	<b>50.00 Persen</b>					<b>4.250.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>
2.14.47.17	Penyusunan Renstra OPD	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Renstra	1.00 Dokumen	Renstra yang dijadikan sebagai pedoman kegiatan untuk 5 tahun	1.00 Dokumen	1.000.000	900.000	900.000
2.14.47.18	Penyusunan Renja OPD	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyusunan Renja OPD	2.00 Dokumen	Tersusunnya Renja dan Renja Perubahan	2.00 Dokumen	2.250.000	1.300.000	1.300.000
2.14.47.20	Penyusunan DPA OPD	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyusunan DPA	2.00 Dokumen	Tersusunnya DPA dan DPPA	2.00 Dokumen	1.000.000	1.500.000	1.500.000
<b>3.</b>	<b>Pilihan</b>										
<b>3.07.</b>	<b>Perindustrian</b>										
3.07.32	<b>Program Optimalisasi Sumber Daya</b>		<b>Peningkatan Index Produktifitas Sumber Daya Ekonom</b>	<b>5.00 Persen</b>					<b>25.000.000</b>	<b>34.575.000</b>	<b>0</b>
3.07.32.3	Sertifikasi Halal bagi IKM	Kabupaten Majalengka			Terlaksananya kegiatan sertifikasi halal untuk IKM pengolahan pangan	1.00 Kali	Meningkatkan omset untuk 10 produk IK	5.00 Persen	25.000.000	34.575.000	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan)	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif dalam RKPD 2019 (Rp)	Pagu dalam DPA OPD (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.07.32	<b>Program Optimalisasi Sumber Daya</b>		<b>Peningkatan Index Produktifitas Sumber Daya Ekonomi</b>	<b>5.00 persen</b>					<b>26,346,000,000</b>	<b>26,279,200,000</b>	<b>26,228,300,000</b>
3.07.32.7	Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bagi IKM	Kabupaten Majalengka			Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan TTG Bagi IKM	1.00 Kali	Menciptakan lapangan kerja untuk menghasilkan pedapatan tetap	20.00 orang	50.900.000	50.900.000	0
3.07.32.9	Pembangunan Berkelanjutan SIKM (DAK)	Kabupaten Majalengka			Terbangunya Sentra IKM tahap 2	1.00 Kali	Peningkatan kapasitas produksi IKM	20.00 Persen	26.170.100.000	26.170.100.000	26.170.100.000
3.07.32.5	Sertifikasi Nilai Kecukupan Gizi bagi Produk Pengolahan Makanan	Kabupaten Majalengka			Terlaksananya Sertifikasi NC Produk Pengolahan Makanan	1.00 Kali	Meningkatkan omset untuk 30 produk IKM	30.00 IKM	125.000.000	58.200.000	58.200.000
<b>Kelompok Program / Kegiatan : NON PRIORITAS</b>											
<b>2.</b>	<b>Wajib Non Pelayanan Dasar</b>										
<b>2.14.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>										
2.14.26	<b>Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat</b>		<b>Jumlah prestasi masyarakat</b>	<b>7.50 Persen</b>					<b>29,900,000</b>	<b>29,900,000</b>	<b>29,900,000</b>
2.14.26.1	Pemilihan Pekerja Teladan	Majalengka			Terseleenggarakannya kegiatan Pemilihan Pekerja Teladan	1.00 Kegiatan	Terlaksananya pemberian Reward kepada pekerja yang berprestasi	95.00 Persen	29.900.000	29.900.000	29.900.000
2.14.32	<b>Program Optimalisasi Sumber Daya</b>		<b>Peningkatan Indeks Produktivitas Sumber Daya Ekonomi</b>	<b>5.00 Persen</b>					<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>
2.14.32.1	Perumusan, Penetapan dan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK dan UMK Sektoral BIJB)	Majalengka			Rekomendasi Bupati mengenai UMK	1.00 Dokumen	Peningkatan pendapatan perkapita 5 ribu pekerja industri besar	2.00 Persen	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2.14.43	<b>Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik</b>		<b>Peningkatan Indeks Produktivitas Sumber Daya Ekonomi</b>	<b>5.00 Persen</b>					<b>135,000,000</b>	<b>411,030,000</b>	<b>411,030,000</b>
2.14.43.10	Pengembangan, Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Diterbitkannya Kartu kuning	15000.00 orang pencari kerja	- Ditematkannya tenaga kerja sesuai dengan lowongan yang tersedia - Tersedianya informasi yang relevan antara pemberi kerja dan pencari kerja (Link and match)	1.00 Dokumen	135.000.000	411.030.000	411.030.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan)	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif dalam RKPD 2019 (Rp)	Pagu dalam DPA OPD (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.14.43	<b>Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik</b>		<b>Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran</b>	<b>12.00 Bulan</b>					<b>1,000,000</b>	<b>650,000</b>	<b>650,000</b>
2.14.43.2	Penyusunan Profil	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyusunan Profil OPD	1.00 Dokumen	Tersusunnya Profil OPD	1.00 Dokumen	1.000.000	650.000	650.000
2.14.45	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik</b>		<b>Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik</b>	<b>1.00 Dokumen</b>					<b>69,725,000</b>	<b>68,900,000</b>	<b>68,900,000</b>
2.14.45.3	Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Dalam Memfasilitasi Penyelenggaraan kegiatan May Day yang Kondusif	Majalengka			Sosialisasi dan koordinasi	1.00 kali	Teridentifikasinya potensi dan solusi permasalahan	3.50 Persen	69.725.000	68.900.000	68.900.000
2.14.47	<b>Program Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terpenuhinya pelayanan dasar perkantoran</b>	<b>1.00 Dokumen</b>					<b>649,052,875</b>	<b>778,152,875</b>	<b>834,042,875</b>
2.14.47.23	Penyusunan DED Gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Majalengka			Jumlah DED	1.00 Dokumen	Tersusunnya DED Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1.00 Dokumen	0	0	0
2.14.47.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan benda pos dan lainnya	12.00 Bulan	4.500.000	4.500.000	1.500.000
2.14.47.10	Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	12.00 Bulan	Terpenuhinya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12.00 Bulan	101.500.000	101.500.000	101.500.000
2.14.47.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12.00 Bulan	Terpenuhinya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.00 Bulan	135.233.375	135.233.375	215.943.375
2.14.47.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 Bulan	Terpenuhinya biaya pemakaian telepon, internet, air dan listrik	12.00 Bulan	122.400.000	122.400.000	111.600.000
2.14.47.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.00 Bulan	Adanya pemeliharaan gedung kantor	12.00 Bulan	18.519.500	18.519.500	18.519.500

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan)	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif dalam RKPD 2019 (Rp)	Pagu dalam DPA OPD (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.14.47.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.00 Bulan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12.00 Bulan	94.300.000	111.985.000	112.985.000
2.14.47.4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.00 Bulan	Tersedianya komponen instalasi listrik	12.00 Bulan	12.004.000	12.004.000	12.004.000
2.14.47.5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.00 Bulan	Tersedianya Peralatan rumah tangga	12.00 Bulan	11.020.000	11.020.000	11.020.000
2.14.47.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyediaan Makanan dan Minuman	12.00 Bulan	Tersedianya makanan dan minuman	12.00 Bulan	62.750.000	174.165.000	168.145.000
2.14.47.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.00 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12.00 Bulan	64.046.000	64.046.000	64.046.000
2.14.47.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.00 Bulan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12.00 Bulan	16.780.000	16.780.000	10.780.000
2.14.47.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka			Dilaksanakannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.00 Bulan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.00 Bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.14.53	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>		<b>Besaran pencari yang terdaftar yang ditempatkan</b>	<b>20.00 Persen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,540,550,624</b>
2.14.53.1	Padat Karya Infrastruktur (Pajak Rokok)	Desa Bantar Agung Kecamatan Sindangwangi, Desa Cipulus Kecamatan Cikijing			Jumlah orang yang melaksanakan padat karya infrastruktur	352.00 Orang	Jumlah orang yang memperoleh penghasilan	352.00 Orang	0	0	1.540.550.624
<b>3.</b>	<b>Pilihan</b>										
<b>3.07.</b>	<b>Perindustrian</b>										
3.07.36	<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>		<b>Tercapainya Indikator Kinerja Tata Ruang</b>	<b>1.00 Dokumen</b>					<b>181,481,000</b>	<b>181,481,000</b>	<b>258,906,000</b>
3.07.36.2	Kajian Pemanfaatan Sentra IKM	Kabupaten Majalengka			Terlaksananya Kegiatan Kajian Pemanfaatan Sentra IKM	1.00 Kali	Adanya aturan pengelolaan dan pemanfaatan Sentra IKM	1.00 Dokumen	181.481.000	181.481.000	258.906.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan)	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif dalam RKPD 2019 (Rp)	Pagu dalam DPA OPD (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.07.43	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik		Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	1.00 Dokumen					46,750,000	46,750,000	46,750,000
3.07.43.1	Updating Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Kabupaten Majalengka			Terlaksananya Kegiatan Updating Pertumbuhan IKM	1.00 Kegiatan	Terpenuhinya SPM Perindustrian	1.00 Dokumen	46.750.000	46.750.000	46.750.000
<b>Jumlah Total</b>									<b>27.887.363.875</b>	<b>28.230.718.875</b>	<b>29.821.269.499</b>



**FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2017  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan K.H. Abdul Halim No. 522, MAJALENGKA 45413  
Telepon/Fax. ( 0233 ) 8291698

# LAMPIRAN

**FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA SKPD**  
**SKPD DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**  
**PERIODE PELAKSANAAN : 2017**

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun .... (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD (%)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	(I)		(II)		(III)		(IV)		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
0			Non Urusan																										
0	0																												
1	0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									
	0	0	1	1.6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD, 100 Persen	5	861.855	3	711.855	1	129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	711.855	60	83	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	
	0	0	1	1.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD, 100 Persen	5	323.374	3	203.374	1	35.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	203.374	60	63	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-		
	0	0	1	1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD, 100 Persen	5	125.000	3	105.000	1	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	105.000	60	84	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-		
	0	0	1	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD, 100 Persen	3	71.700	2	71.700	1	8.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	71.700	67	100	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-		
	0	0	1	1.1 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD, 100 Persen	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-
	0	0	1	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD, 100 Persen	5	479.900	3	359.900	1	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	359.900	60	75	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-		
	0	0	1	1.1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD, 100 Persen	5	694.645	3	494.645	1	124.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	494.645	60	71	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-		
	0	0	1	1.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD, 100 Persen	5	347.746	3	257.746	1	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	257.746	60	74	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-		





NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun .... (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD (%)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	(I)		(II)		(III)		(IV)		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%		(16)	(17)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	0	0	3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	3	87.500	3	87.500	1	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	87.500	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,00		100,00	100,00					
Predikat Kinerja																													
27	0	0	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																									
	0	0	6.3	Penyusunan Pelaporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	5	88.348	3	73.348	1	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	73.348	60	83	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-		
	0	0	6.6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5	55.040	3	40.040	1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	40.040	60	73	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-		
	0	0	6.4	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	5	116.136	3	101.136	1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	101.136	60	87	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-		
	0	0	6.1	Penyusunan Lakip OPD	4	38.515	3	23.515	1	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23.515	75	61	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,00		63,75	75,98					
Predikat Kinerja																													
31	0	0	7	Program Sinergitas Perencanaan dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																									
	0	0	7.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	100	7.250	0	0	100	7.250	0	0	13	2.750	0	0	4.500	4.500	100	7.250	100	100	100	7.250	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun .... (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD (%)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	(I)		(II)		(III)		(IV)		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%		(16)	(17)																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	100,00		100,00	100,00																						
Predikat Kinerja																																														
	2			Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja																																										
1	2	14	15	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																																										
	2	14	15	1.14 Pengembangan, Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan , 35 Persen	90.000	1.000.000	48.000	803.326	25.000	108.580	3,218	27.125	7.258	27.125	3.452	25.625	28.624.500	28.625	25.000	108.498	100	100	73.000	911.824	81	91	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-																	
	2	14	15	1.14 Pendidikan Pelatihan Keterampilan bagi para Pencari Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan , 35 Persen	1.100	3.000.000	590	1.741.779	240	570.869	0	0	120	287.790	120	282.868	0	0	240	570.658	100	100	830	2.312.437	75	77	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-																	
	2	14	15	1.14 Pemberian kerja sementara melalui padat karya infrastruktur (Jalan, Irigasi, DII) dan padat karya produktif	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan , 35 persen	5	2.284.393	3	2.117.243	1	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2.117.243	60	93	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				66,70	66,63		72,04	86,98																						
Predikat Kinerja																																														
4	2	14	17	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																																										
	2	14	17	1.14 Pengendalian dan pembinaan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Lembaga Pelatihan Swasta	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi , 70 Persen	200	145.000	100	68.035	50	20.630	0	0	0	0	0	0	20.630	20.630	50	20.630	100	100	150	88.665	75	61	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	100,00		75,00	61,15																						
Predikat Kinerja																																														
5	2	14	18	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																																										
	2	14	18	1.14 Pemilihan Pekerja Teladan Tingkat Kabupaten	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun , 21.24 Persen	18	162.785	6	94.140	6	33.645	0	0	0	0	6	33.645	0	0	6	33.645	100	100	12	127.785	67	78	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-																	

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun .... (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD (%)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%		(16)	(17)				
	2	14	18	1.14	Penanganan Penyelesaian Kasus TKI dan TKA yang Bermasalah	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun , 21.24 Persen	150	695.000	90	527.652	30	81.500	0	0	0	0	16	13.400	58.300.000	58.300	30	71.700	100	88	120	599.352	80	86	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	
	2	14	18	1.14	Perlindungan terhadap Pekerja Anak dan Perempuan	Persentase jumlah pekerja anak dibawah umur , 0 Persen	5	317.360	3	217.360	1	80.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	217.360	60	68	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-		
	2	14	18	1.14	Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum Kabupaten	-, 0 -	5	865.000	3	649.562	1	104.954	0	0	0	14.926	0	0	78.068.500	78.069	1	92.994	100	89	4	742.556	80	86	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	
	2	14	18	1.14	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun , 21.24 Persen	5	500.000	3	365.490	1	64.605	0	0	1	41.150	0	0	6.650.000	6.650	1	47.800	100	74	4	413.290	80	83	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	
	2	14	18	1.14	Penyebarluasan Informasi Perda IMTA Perpanjangan	-, 0 -	100	65.000	0	0	50	31.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-
	2	14	18	1.14	Pendataan Tenaga Kerja Asing	-, 0 -	1	50.000	0	0	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-
	2	14	18	1.14	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja di Perusahaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun , 21.24 Persen	100	81.300	0	0	50	31.300	0	0	0	0	0	0	31.300.000	31.300	50	31.300	100	100	50	31.300	50	38	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	
	2	14	18	1.14	Peningkatan Kepesertaan Tenaga Kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	-, 0 -	1	75.750	0	0	1	75.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																				55,60	50,06		46,33	48,90							
Predikat Kinerja																															
	3				Pilihan																										
	3	7			Perindustrian																										
1	3	7	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																										
	3	7	16	2.07	Pembangunan Jalan Masuk dan Area Expo Sentra IKM	-, 0 -	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	
	3	7	16	2.07	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Majalengka	-, 1 dokumen	1	200.000	0	0	1	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	
	3	7	16	2.07	Pembangunan Sentra IKM	Terwujudnya pembangunan sentra IKM, 1 Lokasi	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	4.745.208	14.083.83.988	14.083.83.988	14.083.83.988	1	18.829.196	100	94	1	18.829.196	100	94	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-



NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun .... (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD (%)	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Keterangan				
					K	Rp		(I)	(II)	(III)	(IV)	K	Rp	K	Rp			K	Rp				K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		12=8+9+10+11	13=12/7 x 100%	14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%	(16)	(17)		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								26.290.900	172.352	777.731	5.304.19	14.853.1	21.107.474													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			33,33	30,11	60,98	65,30				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya																										

\*) Anggaran (Rp) Dalam Ribuan

Disusun  
....., Tanggal .....,  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MAJALENGKA

Dievaluasi  
....., Tanggal .....,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN MAJALENGKA

( ) ( )